

10. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ditandai dengan kecepatan arus informasi, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan e-government. Kemampuan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel dan transparan.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika. Urusan komunikasi dan informatika diampu secara teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari sub urusan komunikasi dan sub urusan informatika.

Dalam rangka mendukung visi Gubernur Jawa Tengah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, tetap mboten korupsi mboten ngapusi ditetapkan 10 program unggulan Provinsi Jawa Tengah. Salah satu program unggulan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah program Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan sebagai Peringkat Satu Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peringkat Satu untuk Penerapan Layanan Pengaduan Masyarakat serta sebagai Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Informatif dengan nilai terbaik. Hal ini menandakan bahwa layanan informasi kepada masyarakat telah terintegrasi serta berjalan dengan baik dan semakin transparan.

Selain itu, Jawa Tengah dinobatkan sebagai provinsi paling inovatif 2019 dalam Innovative Government Award 3 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri RI kepada Gubernur Jawa Tengah. Inovasi yang dilakukan Pemprov Jateng secara substansi terkait dengan berbagai pelayanan dasar yang diampu oleh beberapa perangkat daerah, yang didukung oleh teknologi informasi.

Untuk menjalankan program unggulan dimaksud, Kebijakan strategis yang ditetapkan sesuai dengan implementasi Misi kedua yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut antara lain dengan "meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services), serta membangun pemerintahan yang transparan (open government) didukung oleh infrastruktur TIK dan integrasi aplikasi untuk penguatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (roadshow)" kanal aduan melalui lapor gub, twitter, facebook,

whatsapp, Instagram, SMS sebagai implementasi Perda Provinsi Jawa Tengah Cerdas yang menjadi dasar hukum inovasi – inovasi SKPD maupun Kabupaten/Kota untuk menjadikan pelayanan publik yang lebih baik.

Kategori yang paling banyak diadakan masih terkait tentang infrastruktur pendidikan, kesehatan dan pelayanan administrasi kependudukan serta urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Urusan Komunikasi dan Informatika di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 3 program, yaitu Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan eGovernment; dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, yang terdistribusi ke dalam 3 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 3 indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika L-I.A.2.10.1-2.

Dari lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Indikator Kinerja Program Fungsi Komunikasi dan Informatika L-I.A.2.10.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memiliki 1 indikator (>100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; 2) Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki 1 indikator (100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi; dan 3) Program Pengembangan eGovernment memiliki 1 indikator (100%) dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, dari 3 indikator seluruhnya (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini :

No.	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1	1	-	-	-	-
2	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	1	-	-	-	-
3	Pengembangan eGovernment	1	1	-	-	-	-
Jumlah		3	3	-	-	-	-

Keterangan :

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut :

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 – 65,99%
- 5) Sangat Rendah : $\leq 50,99\%$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu nilai survey kepuasan komunikasi publik, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 60% dari target 57%.

Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai manfaat yaitu : meningkatnya akses informasi masyarakat melalui beragam media massa, termasuk produksi informasi yang disebarluaskan pada media sosial press conference, media cetak, media elektronik dan website sehingga memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mudah, murah cepat dalam rangka meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah disosialisasikan dan banyaknya aspirasi masyarakat yang masuk melalui kanal informasi yang dibuka.

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 20% sesuai target.

Penyelenggaraan program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan melalui integrasi infrastruktur antar OPD melalui pembangunan *Fiber Optic* (FO). Manfaat menggunakan FO adalah kapasitas bandwidth yang dapat disediakan menjadi lebih besar, data dan informasi mudah diakses lebih cepat, lebih aman karena data tidak mudah disadap, mudah dalam proses migrasi, memiliki *downtime* yang lebih singkat, dan membutuhkan lebih sedikit perangkat keras jaringan.

Program Pengembangan eGovernment, memiliki 1 indikator kinerja program yaitu persentase aplikasi layanan publik terintegrasi, dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, dengan realisasi sebesar 45% sesuai target.

Penyelenggaraan program Pengembangan eGovernment mempunyai manfaat yaitu memudahkan pengambilan kebijakan terkait pembangunan jawa tengah, memudahkan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan dan evaluasi juga meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Program ini dilaksanakan dengan mengintegrasikan aplikasi berbagi pakai di Provinsi Jawa Tengah dalam *Government Resources System Management* (GRMS), Selain itu program ini mengintegrasikan aplikasi LapoGub dengan aplikasi pengaduan masyarakat pemerintah pusat (Lapor SP4N) dan pemerintah kabupaten/kota.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 sejumlah Rp68.352.113.000,00 dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sejumlah Rp19.416.171.000,00 dan **Belanja Langsung** sejumlah Rp48.935.942.000,00 yang terdistribusi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 93,66%.

1) Belanja Langsung

Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, alokasi anggaran sejumlah Rp15.774.250.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 90,84%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu Kegiatan Peningkatan pengelolaan informasi publik dengan keluaran berupa publikasi melalui tv nasional, tv lokal, media online dan radio serta Lomba jurnalistik dengan keluaran 32 konten; Kegiatan Pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik dengan keluaran jumlah komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan sebanyak 58 kelompok; Kegiatan Analisis berita dan pendapat publik dengan keluaran jumlah rekomendasi analisis berita dan pendapat umum 44 buah.

Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, alokasi anggaran sejumlah Rp28.626.978.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 94,31%. Kegiatan yang mendukung program tersebut yaitu: Kegiatan Pengelolaan Jaringan dan Data Center dengan keluaran terpasangnya jaringan Fiber Optic (FO) yang menghubungkan 41 titik antar OPD/UPT, serta pemeliharaan peralatan dan mesin pusat data berupa perawatan *Precision Air Conditioning* (PAC) yang berfungsi sebagai Sistem pendingin untuk menjaga kestabilan temperatur dan kelembapan di dalam Data Center, dan sewa *Disaster Recovery Center* (DRC) sebagai recovery dan backup data; Kegiatan Pengelolaan Internet dan Intranet dengan keluaran layanan akses internet dan jaringan interkoneksi *main link* dengan *bandwidth* sebesar 700 Mbps dan 800 Mbps jaringan interkoneksi *Redundancy Link* yang berfungsi sebagai jalur *backup* yang di distribusikan ke 48 OPD Provinsi Jawa Tengah; Kegiatan Pengembangan TIK dan Integrasi Infrastruktur dengan keluaran Grand Design Integrasi Infrastruktur TIK di 20 OPD dan 3 titik kabupaten/Kota yaitu kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kota Salatiga dan terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) hasil study Grand Design Integrasi Infrastruktur TIK sebagai pedoman dalam pengintegrasian infrastruktur antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

Program Pengembangan eGovernment, alokasi anggaran sejumlah Rp4.534.714.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,31%. Kegiatan yang mendukung program yaitu Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi dengan keluaran terintegrasikannya aplikasi berbagi pakai milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebanyak 9 aplikasi (*e-Planning, e-Budgeting, e-SHB, e-Project Planning, e-Penatausahaan, e-Audit, e-Controlling APBD dan Kinerja, e-LaporGub, e-Sakip*) ; Kegiatan Peningkatan Kapasitas Penyelenggara *E-Government* dengan keluaran meningkatnya kapasitas penyelenggara *e-Government* terutama bendahara pengguna aplikasi e-Penatausahaan sebanyak 680 orang; Kegiatan Peningkatan Tata Kelola *E-Government* dengan keluaran terbitnya regulasi baru dalam bidang TIK yaitu

Peraturan Daerah Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas dan implementasi Pergub Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi;

2) Belanja Hibah dan Bansos

Belanja Hibah bidang Komunikasi dan Informatika sebesar Rp3.500.000.000,00 kepada Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dengan realisasi pencairan (NPHD) sebesar 100%, dengan pemanfaatannya antara lain untuk monitoring dan evaluasi ketaatan lembaga penyiaran terhadap regulasi penyiaran; monitoring dan evaluasi ketaatan lembaga penyiaran terhadap regulasi kampanye pemilu 2019; pembelajaran cerdas bermedia kepada pelajar, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan; dan rekomendasi kelayakan ijin Penyelenggaraan Penyiaran.

Adapun realisasi Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran : L-II.A.2.10.1-2.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Komunikasi dan Informatika pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan untuk segera diselesaikan pembangunan infrastruktur *fiber optic* (fo) yang tersambung dengan seluruh OPD, baik dalam Provisi maupun Luar Provinsi. Hal ini ditindaklanjuti dengan mengalokasikan anggaran pembangunan fo untuk dalam provinsi yaitu pembangunan fo segmen 2, 3 dan 4 yang mencakup OPD induk Provinsi Jawa Tengah khususnya di wilayah Kota Semarang. Alokasi anggaran pembangunan fo TA 2019 sebesar Rp13.182.715.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100%.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Beberapa OPD masih menganggarkan sewa bandwidth untuk backup jaringan, sehingga menyulitkan untuk *monitoring* penggunaan jaringan;
- 2) Kurang optimalnya penggunaan bandwidth yang telah disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika oleh OPD;
- 3) Belum seluruh server SKPD menyatu ke dalam Data Center Jawa Tengah.

Solusi

- 1) Sentralisasi sewa *backup bandwidth* di Diskominfo secara bertahap;
- 2) Melakukan inventarisasi terkait topologi jaringan pada seluruh OPD Provinsi Jawa Tengah.